

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, terutama dalam profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, baik dari segi *variable* yang digunakan, maupun hasil dari penelitiannya. Berikut ringkasan yang menunjukkan penelitian terhadap *tax avoidance* dari peneliti sebelumnya:

Kurniasih dan Sari, (2013) yang meneliti tentang “Return On Asset, Leverage, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax avoidance”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: secara simultan *Return on Assets* (ROA), *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Sedangkan secara parsial Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Darmawan dan Sukharta (2014), yang meneliti tentang “Pengaruh Penerepan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Asset*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode

analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: *Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sari (2014), yang meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan Pada *Tax Avoidance*”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis induktif. Hasil penelitian tersebut antara lain: Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Maharani dan Suardana (2014), yang meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: *Corporate Governance* dan Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Annisa (2015), yang meneliti tentang “Pengaruh *ROA*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear

berganda dan uji asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: *Leverage* dan *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *ROA*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), yang meneliti tentang “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis uji normalitas, multikolinearita, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian tersebut antara lain: Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, Komite Audit dan *Sales Growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Subagiastra (2016), yang meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran pajak”. Penelitian ini menggunakan metode analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewi dan Noviari (2017), yang meneliti tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear dengan tingkat

signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi negatif, sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi positif.

Hidayati dan Fidiana (2017), yang meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rosalia dan Sapari (2017), yang meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tersebut antara lain: Profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sedangkan *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rinaldi (2015), teori keagenan merupakan kerjasama antara manajemen sebagai pihak yang dikontrak dan pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Menurut Sutedi (2011), pihak pemegang saham (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga ahli (*agent*), yang bertujuan agar pemilik perusahaan dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dan juga memperoleh keuntungan secara maksimal dengan pengeluaran biaya yang efisien karena perusahaan telah dikelola oleh tenaga ahli/professional.

Masalah keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah *conflict of interest*, dimana *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan masing-masing dalam menjalankan perannya, dimana *Principal* sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan *agent*

sebagai pelaku yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi secara lebih menyeluruh. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan-kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta *oportunity cost* yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, 2008).

Timbulnya penghindaran pajak dipengaruhi oleh masalah *agency*. Masalah *agency* yang muncul karena adanya penghindaran pajak disebabkan oleh perbedaan kepentingan, di satu sisi *agent* menginginkan peningkatan kompensasi dari laba yang diperoleh dengan mengenyampingkan resiko jangka panjang perusahaan dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan, di lain sisi *Principal* menginginkan beban pajak yang rendah tanpa menimbulkan resiko terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2. Teori Stakeholder

Teori Stakeholder merupakan teori yang berfokus pada hubungan antara perusahaan dan stakeholder. Stakeholder sendiri merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholders atau pemangku

kepentingan dalam perusahaan dapat dibagi kedalam dua pengertian yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, stakeholders diartikan sebagai kelompok yang dapat mempengaruhi tujuan pencapaian perusahaan diantaranya adalah pemegang saham, karyawan, pesaing, pelanggan dan pemerintah. Dalam arti sempit stakeholders mencakup pegawai, kreditur tertentu, atau pegawai kunci pemerintahan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya (Solihin, 2009).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan dari para stakeholder. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007). Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak dimana merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signaling theory menjelaskan tentang pemberian informasi yang dilakukan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi diantara keduanya. Asimetri informasi dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pihak lain sehingga untuk menguranginya perusahaan harus mengungkapkan informasi baik berupa informasi keuangan dan non keuangan (Fidhayatin dan Dewi 2012). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri.

Selain itu teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*).

Tingkat laba yang dilaporkan perusahaan melalui laporan laba rugi dapat diterjemahkan menjadi sinyal baik maupun sinyal yang buruk. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang buruk. Sinyal-sinyal dari informasi yang beredar dapat mempengaruhi tindakan yang diambil investor. Teori sinyal akan mendorong perusahaan menampilkan laba yang tinggi untuk menarik investor. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan menghadapi beban pajak yang tinggi, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan atau disebut dengan penghindaran pajak.

4. Penghindaran Pajak

Dalam suatu negara, pajak merupakan salah satu sumber terbesar yang menjadi penerimaan negara. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya. Upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983 dalam Surbakti, 2012), terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu :

- a. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya,
- c. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang ketiganya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Annuar *et al.* (2014) menyebutkan bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas

perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Begitu pula dengan manajer merasakan pula manfaatnya dengan diberikannya kompensasi atas manajemen pajak efektif.

Akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas penghindaran pajak. Dalu *et al.* (2012) menyebutkan bahwa sebuah negara yang menghadapi peningkatan jumlah penggelapan pajak dan penghindaran pajak cenderung menunjukkan investasi campuran yang berproduktif rendah, yang mana hal ini berarti pertumbuhan ekonomi rendah dan perusahaan publik akan terkena dampak negatif. Penghindaran pajak yang merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak akan dapat menyebabkan meningkatnya risiko perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik (Sari, 2014). Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka manajer adalah pelaku utama penghindaran pajak. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi.

Dengan mempertimbangkan berbagai macam risiko tersebut, sikap pemegang saham terhadap penghindaran pajak tergantung pertimbangan

mereka terhadap manfaat dan biaya yang menyertainya. Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko apabila manfaat penghindaran pajak melebihi biayanya (Maharani, 2014). Pemegang saham juga berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu banyak sehingga terlalu banyak risiko, atau terlalu sedikit sehingga kurang memaksimalkan keuntungan.

Penghindaran Pajak dapat diukur melalui rasio pajak suatu negara. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. *Cash Effective tax rate* (CETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Cash effective tax rate* (CETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga CETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

5. *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus atau manajemen, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pihak berkepentingan lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Effendi, 2016). Adanya tata kelola yang baik bertujuan mendorong para pemegang

saham, anggota dewan komisaris dan direksi dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai etika. Menurut Sutedi (2011), *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, dalam mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai. Dapat disimpulkan, bahwa *corporate governance* merupakan faktor yang penting dalam pengendalian perusahaan, sehingga aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku demi tercapainya tujuan organisasi.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Terdapat lima asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006). Berikut penjelasannya:

a. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesenjajaran (Fairness)*

Terdapat perlakuan yang sama berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku terhadap semua pemegang saham (termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas).

Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh kesejajaran mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang dikenal sebagai *corporate governance*, yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal, seperti pemerintah dan manajemen (Mulyadi & Anwar, 2015). Hal ini tentu saja akan lebih memudahkan perusahaan untuk mendapatkan investasi demi

pengembangan perusahaan, seperti yang dikatakan oleh Okiro *et al.* (2015) bahwa dengan struktur tata kelola, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari investor sebagai cara meningkatkan fungsional struktur tata kelola untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi, dan mengurangi konflik keagenan.

Ada beberapa cara untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), diantaranya:

- a. Melakukan *self-assessment* sesuai dengan metode dan tata cara *assessment* GCG (*Good Corporate Governance*) yang diterbitkan oleh sejumlah regulator.
- b. Mengundang konsultan GCG (*Good Corporate Governance*) untuk melakukan tata kelola perusahaan.
- c. Berpartisipasi mengikuti CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) bekerjasama dengan majalah SWA.

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur dan/atau menilai penerapan *corporate governance* adalah CGPI (*Corporate Governance Perception Index*), yang bekerjasama dengan majalah SWA.

6. CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

CGPI (*corporate governance perception index*), merupakan skor dari program riset dan pemeringkatan penerapan GCG (*good corporate governance*) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas

penerapan konsep CG (*corporate governance*) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan *benchmarking* (Siregar, 2015).

Program CGPI ini bersifat sukarela, selektif, dan elektif. Keikutsertaan perusahaan dalam program ini merupakan sebuah pilihan (elektif) secara sukarela (*voluntary*) tanpa disadari untuk memenuhi aturan (*mandatory*), serta mempertimbangkan kesiapan internal perusahaan (selektif). CGPI ini dinilai oleh lembaga IICG (*Indonesia Institute for Corporate Governance*) yang dilakukan sejak tahun 2001.

Corporate governance perception index memiliki 4 tahapan penilaian yang meliputi *self assessment*, penilaian dokumen, penilaian makalah dan observasi. Berikut penjelasannya:

a. *Self Assessment*

Adalah penilaian mandiri oleh seluruh organ, anggota, dan pemangku kepentingan dari perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di perusahaan. Pada tahapan ini perusahaan mengisi kuesioner dengan mengajak responden memberikan persepsinya secara jujur dan objektif guna memberikan umpan balik dan evaluasi kepada perusahaan. Daftar responden terdiri dari 2 kalangan responden yakni responden internal dan responden eksternal. Responden internal terdiri dari jajaran manajemen (Presiden Komisaris, Presiden Direktur/ Direktur Utama), Dewan Pengawas Syariah, anggota Komite dibawah Dewan Komisaris dan komite

eksekutif, pegawai manajerial dan pegawai non manajerial termasuk *corporate secretary*, Audit Internal dan Wakil dari Serikat Pekerja. Responden eksternal terdiri dari investor institusi dan investor minoritas, lembaga pembiayaan, asuransi, asosiasi industry, regulator, mitra kerja, lembaga pemeringkat dan berbagai instansi lainnya.

b. *Kelengkapan Dokumen*

Kelengkapan dokumen adalah pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian. Bagi perusahaan yang telah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan pada penyelenggaraan pada CGPI sebelumnya, maka pada CGPI yang terbaru cukup hanya memberikan pernyataan konfirmasi bahwa dokumen sebelumnya masih berlaku. Jika terjadi perubahan, dokumen yang direvisi hari dilampirkan. Dokumen tersebut akan dikaji dan dianalisa untuk kemudian dikelompokkan menjadi tujuh bagian yang mewakili *governance structure, governance system, governance process, governance mechanism, governance output, governance outcome, dan governance impact*. Dokumen yang disampaikan meliputi anggaran dasar, *board charter* untuk Dewan Komisaris, GCG Manual, *Code of Conduct*, *Annual Report*, *Internal Audit Charter*, *Prospektus*, *Public Expose*, dan berbagai dokumen lainnya yang dimintakan sesuai dengan tema penilaian.

c. Penyusunan Makalah

Penyusunan makalah merupakan salah satu pemenuhan persyaratan penilai yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Uraian makalah menggambarkan arah dan fokus penilaian yang sesuai dengan pedoman sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, penulisan harus memenuhi kriteria teknis yakni sesuai dengan format penulisan serta memenuhi sistematika penulisan yang terdiri dari cover, lembar pengesahan dan isi. Untuk isi, makalah disusun dengan urutan-urutan yang diawali dengan abstrak yang memuat uraian ringkas terhadap isi makalah, kemudian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat. Setelah bagian pendahuluan adalah bab utama yang menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan tema penilaian dari CGPI, kemudian bagian hasil yang dicapai dan ditutup dengan bagian penutup.

d. Observasi

Observasi adalah tahapan akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Pelaksanaan observasi dilaksanakan dalam bentuk presentasi dan diskusi tanya

jawab dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu tim penilai dapat melakukan verifikasi data-data dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penilaian CGPI yang lebih akurat.

Hasil dari CGPI (*corporate governance perception index*) dinyatakan dalam bentuk skor, dimana bila semakin tinggi skor yang diperoleh perusahaan, maka semakin baik pula penerapan GCG (*good corporate governance*) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (www.iicg.org).

Rentang skor CGPI terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Nilai antara 55.00% sampai dengan 69.99% mendapat predikat sebagai perusahaan “cukup terpercaya”.
- b. Nilai antara 70.00% sampai dengan 84.99% mendapat predikat sebagai perusahaan “terpercaya”.
- c. Nilai antara 85.00% sampai dengan 100% mendapat predikat sebagai perusahaan “sangat terpercaya”.

7. Profitabilitas

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan profit ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya, rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur bagaimana kondisi kesehatan perusahaan, terutama kondisi finansial. Menurut Sutrisno (2009:221), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. rasio keuangan dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua informasi keuangan kuantitatif individual yang terhubung satu sama lain dalam beberapa cara yang logis dan hubungan ini dianggap sebagai indikator keuangan yang memiliki makna yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan yang berbeda.

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar besarnya, selain itu rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Saputra dan Asyik, 2017). Seringkali rasio profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen operasi maupun investor dan kreditor. Bagi investor, laba merupakan satu-satunya tolak ukur perubahan nilai efek suatu perusahaan. Bagi kreditor, laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Ratio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas ialah *return on assets* (ROA), yang mana pengukuran ini digunakan untuk mengetahui

bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. ROA adalah indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan.

C. Perumusan Hipotesis

Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yaitu menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan, menentukan bagaimana perusahaan menerapkan manajemen pajak. Timbulnya penghindaran pajak dipengaruhi oleh masalah *agency*. Masalah *agency* yang muncul disebabkan oleh perbedaan kepentingan, di satu sisi *agent* menginginkan peningkatan kompensasi dari laba yang diperoleh dengan mengenyampingkan resiko jangka panjang perusahaan dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan, di lain sisi *principal* menginginkan beban pajak yang rendah tanpa menimbulkan resiko terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Selain teori *agency*, teori stakeholder merupakan teori yang mendasari hubungan *corporate governance* dengan penghindaran pajak. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007). Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah

satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak dimana merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana, (2014) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi negatif. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukharta, (2014) dan Annisa, (2015) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Good Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan profit ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas (Darmawan dan Sukhata, 2014).

Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan, dimana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat

dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas didasarkan pada teori *agency*. Adanya teori *agency* akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori *agency*, akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent*, sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak dengan memanfaatkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal* dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak.

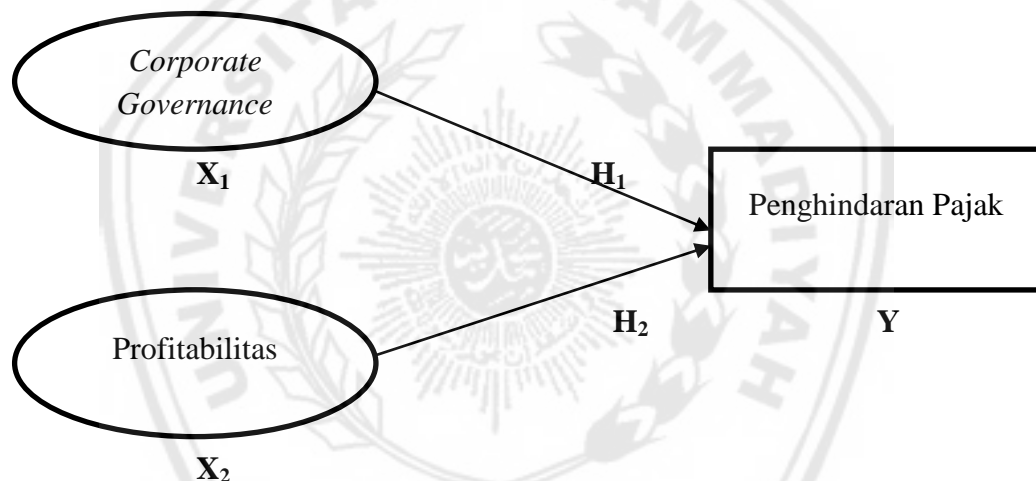
Selain teori *agency*, teori sinyal merupakan teori yang mendasari hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik bagi para investor karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang buruk bagi para investor. Teori sinyal akan mendorong perusahaan menampilkan laba yang tinggi untuk menarik investor, laba yang tinggi akan menghadapi beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaga laba agar tetap tinggi maka perusahaan akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah perpajakan atau penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukharta, (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah yang positif. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan

oleh Dewi dan Noviasari, (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Kurniasih, (2013) menunjukkan hal yang sama bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah yang positif. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Teoritis